

SKRIPSI



Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

OLEH

FARADILLAH PARATAMA

B111 09 003

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

HALAMAN JUDUL

**Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di
Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone**

Oleh

FARADILLAH PARATAMA

B111 09 003

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana

Pada Bagian Hukum Tata Negara

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

ABSTRAK

FARADILLAH PARATAMA. B111 09 003, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa* (dibimbing oleh **Aminuddin Ilmar** dan **Mucshin Salnia**)

Peraturan Daerah merupakan salah satu langkah terselenggaranya Otonomi Daerah, begitupula dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bone telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai acuan pemberian dana ADD. Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. ADD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lappariaja dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel yakni mengambil 5 Desa dari 9 Desa di Kecamatan Lappariaja.. Sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan di lapangan berjalan cukup baik, tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dan prosedur pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman pelaksanaan ADD. Tahap perencanaan telah dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti, hingga tersusunnya dokumen perencanaan ADD dalam Peraturan Desa. Selanjutnya, tahap pelaksanaan juga berjalan lancar dan cukup baik. Namun masih ada sedikit hambatan dimana penyaluran dana ADD tidak bertepatan dengan waktunya yang menimbulkan adanya keterlambatan sehingga kegiatan terlambat untuk dilaksanakan serta sistem pembagian dananya sering berubah-ubah.

ABSTRACT

FARADILLAH PARATAMA. B111 09 003, *The Implementation Of The Regional Regulation No. 11 Year 2008 On The Village Fund Allocation In An Effort To Empower People In The District Lappariaja* (Supervised by **Aminuddin Ilmar** and **Mucshin Salnia**)

Local regulation is one step implementation of regional autonomy, nor in terms of the implementation of regional regulation. Bone regency government has issued Regulation No. 11 Year 2008 on the allocation of village funds (ADD) ADD funding as a reference. Granting rights ADD is a form of fulfillment of village autonomy within the framework of the implementation of the village. ADD sourced from the fund balance of central and local finance received by the District.

This study took place in the District Lappariaja of Bone. The purpose of the study is to determine how the implementation of the Regional Regulation No. 11 Year 2008 on the Village Fund Allocation in an effort to empower people in the District Lappariaja and obstacles encountered in the implementation. This research is descriptive qualitative research. The data used consists of primary data and secondary data, the techniques of data collection through interviews, and documentation. Sampling techniques that take 5 Village of Villages in District 9 Lappariaja. While the analysis of the data used is qualitative analysis.

The survey results revealed that the implementation on the ground quite well, is not contrary to local regulation and implementation procedures are in accordance with the decree No. 04 of 2009 on Guidelines for the conduct of ADD. Planning phase has been implemented well without significant barriers, until completion of the ADD planning in village regulations. Furthermore, the implementation phase is also running smoothly and fairly good. But there are still a few obstacles which funds ADD does not coincide with the time the cause of a delay so that the activity is late to be implemented as well as the distribution system funds change often.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone**” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam juga penulis haturkan pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pencerahan bagi ummat manusia, Nabi teladan bagi kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena factor keterbatasan diri penulis sebagai umat manusia yang berada dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya senantiasa membangun disertai dengan solusi bagi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis **Drs.H.Muh. Arsyad Aras, M.Si** dan **Hj.Rahmatia S.Pd** yang telah membesarkan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis dengan doa serta restunya demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan dan keseharian hingga dapat menyandang gelar sarjana, serta adik-adikku tercinta **Panji Dwi Guna** dan **Ummul Mukminin** yang senantiasa menemani serta

mendukung penulis. Serta segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Selain itu, dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, kepada:

1. Bapak Prof. DR. Dr. A. Idrus Paturusi, Sp.Bo selaku Rekrtror Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Salleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Mucshin Salnia, S.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Tim Penguji yaitu Bapak Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Si, Bapak Naswar, S.H., M.H. dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H., terima kasih atas tanggapan dan sarannya.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis, serta pegawai Akademik atas bantuan dan pelayanannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak Camat Lappariaja Andi Kadir Lebu, S.H., Sekertaris Camat Lappariaja Bapak Drs. H.M. Arsyad Aras, M.Si beserta seluruh staf dan Kepala Desa di Kecamatan Lappariaja, diantaranya Kepala Desa Sengeng Palie Bapak H. Abd.Asis P, Kepala Desa Wae Kecce'e Andi Lilin Aman, Kepala Desa Mattampa Walie Bapak Rustan Pale, Kepala Desa Ujung Lamuru Bapak Haripuddin dan Kepala Desa Liliriattang Bapak Firdaus Makis yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan selama penulis melakukan penelitian, serta informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Buat saudara sepupuhku Abd. Rais Asmar S.H., M.H., atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Buat sahabat-sahabatku Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin saudara Randi Ariadi Suardi S.H., Mahaffir Syamhur S.H., Muh. Nasrul Hamsah, S.H., Andi Evan Hidayat S.H., Muh.Ikhsan Aris, Rahmat, Rahiman, Parman S.H., Ahyar Bakri S.H., Muh. Zein Nur, S.H., Kiki Fatmalasari, S.H., A.Lisa Indriyani S.H., Wana Sari, S.H., dan semua teman yang mewarnai hidup penulis dengan keceriaan, banyak suka dan duka kita lalui bersama, terima kasih atas dukungan, persahabatan, dan kebersamaan yang begitu indah.
9. Teman-teman di Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Bone Universitas Hasanuddin Latenritatta, Ikatan Mahasiswa Hukum Bone, dan Kesatuan Pemuda dan Mahasiswa Bone Kecamatan Lappariaja

yang telah memberikan tempat, perhatian, dan pengalaman yang sangat berharga selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu demi satu.

Tiada kata yang dapat penulis lakukan selain memohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada, semoga Allah S.W.T. yang dapat membalas semua kebaikan kalian. Amin

Makassar, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Kecamatan Lappariaja.....	8
Tabel 2. Data penduduk Kecamatan Lappariaja.....	56
Tabel 3. ADD Kecamatan Lappariaja Tahun 2012.....	72

Tabel 4. ADD Kecamatan Lappariaja Tahun 2013.....	73
--	----

73

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v

UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dan Keuangan Daerah	12
1. Otonomi Daerah	12
2. Pemerintahan Daerah	15
3. Peraturan Daerah	16
4. Keuangan Daerah	18
B. Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, dan Peraturan Desa	22
1. Otonomi Desa	22
2. Pemerintahan Desa	27
2.1 Kewenangan Pemerintah Desa	33
2.1.1 Kepala Desa	33
2.1.2 Badan Perwakilan Desa	36
3. Peraturan Desa	39
3.1 Materi Muatan Peraturan Desa	41
3.2 Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa	42
C. Alokasi Dana Desa	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	49
B. Jenis dan Sumber Data	49
C. Populasi dan Sampel Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	53
2. Gambaran Umum Kecamatan Lappariaja	54
B. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa	57
C. Penelitian dan Pembahasan	73
1. Pelaksanaan ADD di Kecamatan Lappariaja	74
2. Hambatan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah di Indonesia akan dibagi menjadi daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Dan Desa.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat Desa (pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa) merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah.

Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintahan Desa telah mengalami perbedaan sudut pandang utama dalam hal kewenangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan dan pembelajaran kepada pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia bahwa sekitar 60 % (enam puluh per seratus) atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Pada pasal 68 tersebut, disebutkan bahwa salah satu dari sumber pendapatan Desa adalah adanya bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diperuntukkan bagi Desa dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dibagi secara proporsional pada masing-masing Desa. Bagian dari dana perimbangan itu disebut dengan Alokasi Dana Desa.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah dijelaskan tentang definisi dari Alokasi Dana Desa. Dimana yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang

bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah bagi pemerintah Kabupaten/Kota. Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan mengenai tata cara perhitungan dan Alokasi Dana Desa diatur dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/Sj Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

- hasil usaha desa;
- hasil kekayaan desa;
- hasil swadaya dan partisipasi;
- hasil gotong royong;
- lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;

d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%

(sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bone membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, dalam hal tujuan, sumber dan proporsi Alokasi Dana Desa dimana dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan tujuan Alokasi Dana Desa yakni untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa. Dimana hal tersebut diperjelas pada ayat 3 bahwa pembagian alokasi dana desa untuk setiap desa secara proporsional.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Bone yakni Kecamatan Lappariaja secara khusus, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Surat Bupati Nomor 142/544/III/PEMDES perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2010.

Dalam surat Bupati Nomor 142/544/III/PEMDES dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima tahun 2010 sebesar Rp.35.000.000,- per-desa, akan tetapi didalam Perda No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa system pembagian ADD dilakukan secara proporsional.

Pada surat edaran bupati No.141/878/IV/PEMDES tentang petunjuk penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2011 tetap menggunakan system pembagian dengan system minimal yakni pembagian rata tiap desa sebesar Rp.48.000.000,- per-desa dan tahun 2013 sebesar Rp. 59.500.000,- per-desa padahal setiap desa tingkat kebutuhannya berbeda-beda dan hal ini tidak selaras dengan Perda No.11 tahun 2008 yang menerapkan sistem proporsional.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Permasalahan lain yang ditemui yakni masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima . Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone memberikan kontribusi sebesar Rp. 535.500.000,- pada tahun 2012 sedangkan jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 46.500.000,- sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1

No.	DESA	Jumlah PAD (Tahun 2012)	Jumlah ADD (Tahun 2012)
1.	Desa Sengeng Palie	Rp. 4.500.000	Rp.59.500.000
2.	Desa Wae Kecce'e	Rp. 5.000.000	Rp.59.500.000

3.	Desa Liliriattang	Rp.5.500.000	Rp.59.500.000
4.	Desa Mattampa Walie	Rp. 9.000.000	Rp.59.500.000
5.	Desa Tonronge	Rp. 3.750.000	Rp.59.500.000
6.	Desa Patangkai	Rp. 5.250.000	Rp.59.500.000
7.	Desa Ujung Lamuru	Rp. 4.500.000	Rp.59.500.000
8.	Desa Tenri Pakkua	Rp. 4.500.000	Rp.59.500.000
9.	Desa Pattuku Limpoe	Rp. 4.500.000	Rp.59.500.000
Jumlah		Rp. 46.500.000	Rp.535.500.000

Sumber : APBDES Kecamatan Lappariaja

Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian dikarenakan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan Desa dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain. Apabila Alokasi Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Desa.

Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 menuntut agar semua pihak yang bersangkutan dapat melaksanakannya. Namun pada pelaksanaannya sejak diterbitkannya perda tersebut tidak berkesesuaian antara aturan perda dengan pelaksanaannya. Maka dalam hal ini penulis mengangkat sebuah judul :

“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bone , yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lappariaja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian , adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dan Keuangan Daerah

1. Otonomi Daerah

Secara etimologis, otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu 'auto' yang berarti sendiri dan 'nomo' yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi juga dapat berarti sebagai pengundangan sendiri. Mengatur atau memerintahkan sendiri atau pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan. Bagir Manan (dalam Azam awang 2010: 52) menyatakan bahwa:

“otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri.”

Dalam sebuah literature Belanda, otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid en zelfstandigheid*) untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ini mengandung arti “atas nama dan tanggung jawab sendiri” (*op eigen naam en verantwoordelijkheid*) menurut menurut M.C. Burkens dalam Ridwan (2009: 26)

Menurut Murtir Jeddawi (2006: 48), otonomi daerah diartikan sebagai,

“Otonomi Daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan batas wewenang yang diberikan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa :

“otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.”

Rumusan pasal ini tidak begitu berbeda dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 huruf (h) UU No.22 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut;

“otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam kedua redaksi peraturan perundang-undangan diatas yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, keduanya menitikberatkan pada kepentingan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa kata “kepentingan masyarakat” merupakan kalimat ambigu atau multitafsir dan mencakup banyak hal yang dapat menyebabkan otonomi daerah memiliki cakupan yang sangat luas dan bahkan menjadi tidak proporsional. oleh karena itu, perlu adanya pembatasan sebagaimana telah ditetapkan kewenangan

daerah otonom yakni untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga daerah, Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan militer , fiscal dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintahan pusat.

Hal diatas dipertegas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pemerintahan daerah (daerah otonom) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan pusat, dan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.

Jadi otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan orang/badan yang menjadi pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi.

Dalam undang-undang pemerintahan daerah Pasal1 angka (6) daerah otonom yakni :

“kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Suatu daerah dapat dikatakan otonom apabila disamping sanggup melaksanakan pengaturan secara otonom, juga melaksanakan pemerintahan secara otonom.

Tidak semua daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonom, untuk menjadi sebuah daerah otonom harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi sebuah daerah otonom. syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesiapan sumber daya masyarakat/aparatur yang berkeahlian,
2. Adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, masyarakat, sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
3. Otonomi daerah yang diterapkan adalah otonomi dalam koridor Negara Kesatuan republic Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

“Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dari perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”

Kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepala daerah dibantu perangkat daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan khusus untuk daerah kabupaten/kota ditambahkan dengan kecamatan dan desa/kelurahan.

Gubernur sebagai kepala daerah propinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah daerah dalam arti untuk menjembatangi dan memperpendek rentang kendali.

3. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2010:190) Peraturan Daerah adalah:

“salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud oleh pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945.”

Peraturan daerah juga dapat diartikan sebagai naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan kata lain Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang yang lebih tinggi yang dibuat dan berlaku di daerah otonom yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah, Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan daerah lainnya.

Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintahan daerah, maka gagasan peraturan daerah boleh berasal dari DPRD atau Pemerintahan daerah selama hal tersebut bersesuaian dengan kepentingan daerah. Maka dalam prosesnya, rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala daerah dalam hal ini pemerintah daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar. Sedangkan, rancangan peraturan daerah yang berasal dari

usulan prakarsa DPRD disertai penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya akan diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota DPRD untuk dibahas dalam sidang DPRD.

Fungsi Peraturan daerah itu sendiri disebutkan dalam Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Ayat (2): perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.
- b. Ayat (3): Merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas :

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (bila diperlukan);
- F. Lampiran (bila diperlukan).

4. Keungan Daerah

Pengelolaan keungan daerah telah mengalami berbagai macam penyempurnaan secara konstitusi dimana telah tertuang secara resmi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan dilengkapi dengan

Undang-undang 34 Tahun 2000. Saat ini, peraturan tersebut telah disempurnakan dalam Undang-undang 32 dan 33 Tahun 2004. Pengertian keuangan daerah dijelaskan dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah :

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam Undang-undang pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang disumbangkan.

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan

pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya. Dua puluh persen bagian daerah tersebut terdiri dari 8 persen bagian Propinsi dan 12 persen bagian Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90 persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90 persen tersebut, 10 persennya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat. Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen merupakan bagian pemerintah pusat. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan 15 persen dan 30 persen.

Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan, ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari DAU.

Sebagaimana pembahasan kita mengenai alokasi dana desa bahwa salah satu dari sumber pendapatan Desa adalah adanya bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diperuntukkan bagi Desa dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dibagi secara proporsional pada masing-masing Desa yang disebut ADD.

B. Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, dan Peraturan Desa

1. Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus

rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Berbagai penjelasan tentang otonomi telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan otonomi desa. Ndraha dalam Azam Awang (2010: 53) menyatakan bahwa

“otonomi merupakan hak bawaan suatu masyarakat, bukan harian pemerintah. Dimana Hak adalah bagian integral kedaulatan, sedangkan Kewenangan bagian integral dari kekuasaan. posisi otonomi desa adalah hak bawaan.”

Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk. Struktur social sejenis desa , masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting, desa sebagai institusi otonom dengan otonomi asli, dia mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokalnya masing-masing. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi sehingga desa merupakan miniatur dari wujud bangsa yang paling kongkret.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).”

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, factor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas 16 yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya

sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut

tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan desa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat(istiadat) tertulis maupun tidak tertulis,sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian, perkebunan, pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa lainnya. Pemerintah Desa merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintah desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat desa.(Azam Awang 2010: 49)

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah berlaku kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang Pemerintah Desa No. 5 tahun 1979 yang menyatakan bahwa,

“desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga disebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desanya. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dipandang terlalu liberal dan federalistik, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan NKRI. Pembagian kewenangan terlalu mutlak pada daerah membuat perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah tidak proporsional, sehingga kontrol pusat dan provinsi terhadap daerah hilang. Dikhawatirkan UU ini rentan melahirkan konflik dan masalah di tengah masyarakat. Karena berbagai kelemahan tersebut, maka UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diganti dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam konteks otonomi desa terdapat perbedaan mendasar antara UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat perubahan positif

dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan juga peraturan pelaksanaannya yaitu PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dapat mendorong peningkatan otonomi lokal dan desa, antara lain:

- a. Ditentukannya pemilihan langsung bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 56 sampai 119. Model pemilihan langsung ini membawa banyak keuntungan terutama dalam kerangka demokratisasi, dimana aspirasi rakyat tidak mungkin lagi direduksi oleh kekuatan parpol.
- b. Pengaturan tentang kewenangan yang menurut pasal 206 jo. Pasal 7 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, rasanya lebih komprehensif, karena implikasi yuridisnya juga diatur dalam pasal 10 ayat 3 dimana desa mempunyai hak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana, dan sarana serta sumber daya manusia.
- c. Dalam pengaturan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah akan mendapatkan bagian (alokasi). Hal ini tentu berbeda dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggunakan istilah bantuan keuangan. Bagian keuangan desa secara relatif pasti telah ditentukan dalam Pasal 68 PP No 72 tahun 2005 tentang Desa, yaitu sebesar minimal 10% dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan sebagai wujud dari penerapan semangat otonomi desa, maka pemerintah pusat secara berjenjang sesuai dengan hierarkinya melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintahan desa. Pada dasarnya kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang sah untuk bertindak atau melakukan sesuatu.

Dalam pembagian kekuasaan Negara akan terbagi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan desa. Selanjutnya kekuasaan pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Besarnya pembagian kekuasaan ini antara berbagai level struktur pemerintahan berbeda-beda, tergantung dari sistem politik kekuasaan yang diterapkan, kontrak politik didalam konstitusi, kebijakan utama, orientasi pembangunan, dan berbagai hal yang bersangkutan dengan tata pemerintahan.

Kebutuhan kewenangan pemerintah desa tidak lain untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga desa sendiri serta untuk memperkecil intervensi pemerintah di atasnya dalam urusan tangga desa. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa merupakan kewenangan desa itu sendiri, baik untuk membuat dan menetapkan suatu kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan kepada kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat lokal setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan kewenangan otonomi bagi pemerintahan desa bisa dilihat sebagai landasan untuk berekspresi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan aspirasi dan keanekaragaman desa. Otonomi bagi pemerintahan desa sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya otonomi desa, desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan kepentingan masyarakat desa setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat desa.

Menurut Azam Awang (2010:53), Desa yang otonom adalah,

“desa yang mandiri dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi ke Desa maka semakin tinggi tingkat otonomi desa.”

Lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan

otonomi harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7 huruf b juga memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Pemerintah Desa terdiri dari pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sesuai dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa adalah “lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (PP Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 29).

Berdasar PP No 72 tahun 2005 pasal 30 tentang Desa dijelaskan bahwa anggota Badan Permasyarakatan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah

anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

a. Kewenangan Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan.

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban berdasar ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Di atas telah disebutkan bahwa tugas dari kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dimaksud dari urusan pemerintahan yaitu antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Kemudian tugas kepala desa dalam hal pembangunan yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. Sedangkan tugas kemasyarakatan kepala desa yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat. Atas pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Di dalam laporan tersebut berisi laporan dari semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban atas tugas kepala desa ini dilakukan sebagai upaya

untuk mewujudkan suatu akuntabilitas dalam suatu pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam perwujudan transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

2. Badan Perwakilan Desa

Dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mengajukan rancangan peraturan desa.
2. Mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat.
3. Memilih dan dipilih.
4. Memperoleh tunjangan.

Sedangkan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 37 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah sebagai berikut:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memproses pemilihan kepala desa,

mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

5. Menghormati nilai-nilai sosial dan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dalam lembaga kemasyarakatan.

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 34 PP No 72 tahun 2005 tentang Desa adalah sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
6. Hak dari Badan Permusyawaratan Desa adalah meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang terdapat di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 209 menyebutkan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang reponsif. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD, pembuatan Perdes bersama dengan Pemerintah Desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kinerja BPD dalam pelaksanaan otonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

3. Peraturan Desa

Keberadaan Peraturan Desa mulai dikenal sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu tugas dari Badan Perwakilan Desa, sebuah badan yang dibentuk sebagai perwujudan demokrasi ditingkat desa.

Pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mengakui dan menguatkan Peraturan Desa meskipun tetap belum memberikan definisi atau batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa. Definisi tentang Peraturan Desa disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Definisi ini juga yang digunakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang Desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Desa didudukan menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang digolongkan ke dalam salah satu bentuk Peraturan Daerah. Hal ini kemudian hari diakui sebagai sebuah kesalahan karena

Peraturan Desa berbeda dengan Peraturan Daerah sehingga di dalam Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa dikeluarkan dari hierarkhi peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menurut Nimatul Huda(2007:89) menyatakan bahwa peraturan desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan adat istiadat
- b. Tidak bertentangan peraturan yang lebih tinggi
- c. Tidak mengatur pungutan yang telah dipungut retribusi maupun pajak
- d. Sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah

Berdasarkan hal tersebut, adat istiadat sangat berperang penting dalam penyelenggaraan perdes itu yang menandakan bahwa dalam pembuatannya masyarakat berhak ikut dan mengetahui dalam proses pembuatan perdes tersebut.

a. Materi Muatan Peraturan Desa

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tidak menyebut secara khusus tentang apa saja materi muatan Peraturan Desa, tetapi hanya menyebutkan untuk pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan pengelolaan keuangan desa yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa harus ditetapkan di dalam peraturan desa (pasal 211 dan Pasal 212). Sedangkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada pasal 55 menyebutkan bahwa Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Adapun materi muatan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jika mengacu kepada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentu saja materi muatan Peraturan Desa menjadi sangat luas, sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 hanya mengatur hingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga apa yang akan diatur oleh Peraturan Desa sudah sedemikian terbatas dan bergantung

kepada pendelegasian atau tugas pembantuan dari pemerintahan ditingkat yang lebih tinggi. Mengacu pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut maka artinya Pemerintah Desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk menjabarkan sebuah peraturan perundang-undangan ditingkat lebih tinggi jika tidak ada perintah dari peraturan perundang-undangan atau pendelegasian karena urusan atau kewenangan asli yang diselenggarakan oleh desa sangat terbatas.

Materi muatan yang secara khusus disebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 untuk ditetapkan dengan Peraturan Desa adalah pembentukan dusun atau dengan sebutan lain (Pasal 3), susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah desa (Pasal 12), APBDes (Pasal 61 dan 73) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Pasal 64), Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 76), Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Pasal 78), dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89).

b. Mekanisme pembentukan peraturan desa

Dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memerintahkan bahwa pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. asas pembentukan;
- b. perencanaan penyusunan;
- c. materi muatan;
- d. pembahasan dan pengesahan;
- e. teknik penyusunan;
- f. penyebarluasan; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Akan tetapi penyusunan Peraturan Daerah dimaksud juga harus memperhatikan perkembangan terbaru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Peraturan Desa tidak lagi ditempatkan di dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan sehingga beberapa hal khususnya dalam materi muatan harus disesuaikan. Sistematika di batang tubuh dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus mengikuti susunan di dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 26 Tahun 2007.

Substansi yang perlu diperjelas atau dipertegas di dalam Peraturan Daerah tersebut adalah :

- a. materi muatan Peraturan Desa;
- b. perencanaan penyusunan peraturan desa yang berdasarkan kebutuhan nyata, baik berdasarkan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, perlunya kajian yang dibutuhkan dalam hal peraturan desa tertentu seperti pembentukan dusun;
- c. mekanisme pembahasan, hak BPD dan Kepala Desa, bisa menjadi acuan Peraturan Tata Tertib pembahasan di BPD.
- d. mekanisme pengawasan preventif dan represif, dalam hal ini Peraturan Daerah perlu menegaskan pendelegasian pengawasan kepada camat atau tidak, instansi mana yang bertugas melakukan pengawasan Peraturan Desa di Pemerintah Kabupaten, bagaimana dengan peran bagian hukum di kabupaten, pengajuan keberatan terhadap Peraturan Desa oleh masyarakat, pembatalan Peraturan Desa;
- e. mekanisme partisipasi masyarakat, bukan sekedar norma umum;

Sedangkan hal-hal lain dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan disesuaikan dengan kepentingan daerah.

Pada intinya Penyusunan Peraturan Desa bukanlah sebuah kegiatan yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diemban oleh Kepala Desa dan BPD, melainkan benar-benar untuk

menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Peraturan Desa sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur masyarakat harus memiliki wibawa sehingga dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri.

C. Alokasi Dana Desa

Semenjak berlakunya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Munculnya Undang-Undang tersebut telah merubah paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Salah satu wujud implementasi Undang-Undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah telah berusaha untuk menggali berbagai potensi yang ada di daerahnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian juga dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga telah banyak berorientasi pada pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat pedesaan. Hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan, baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hirarki susunan pemerintahan di negara Indonesia juga mengemban amanat otonomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan semenjak Tahun 1999. Dalam upaya peningkatan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintahan desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan.

Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Bagian perolehan desa dari kabupaten disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan melalui kas desa. Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Pemahaman tentang eksistensi Alokasi Dana Desa (ADD), dapat ditelusuri dari uraian pasal yang telah dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 212 ayat (3) yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa,

- b. Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota,
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah yang diterima Kabupaten/Kota
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga

Memperhatikan substansi yang terkandung dalam susunan ayat (3) di atas, dapat dimengerti bahwa terdapat hubungan keuangan antara Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) bentuk yang meliputi

- a. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat
- c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Tujuan pemberian bantuan langsung alokasi dana desa antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa.

Dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bone telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa dengan merujuk pada aturan yang lebih tinggi. Akan tetapi masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Agar lebih mengerah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas baik menyangkut permasalahan dari objek penelitian itu sendiri maupun lokasi atau tempat/wilayah dimana penelitian akan berlangsung. Adapun, lokasi yang dimaksud adalah wilayah Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone terkhusus kepada desa-desa di wilayah kecamatan Lappariaja.

Adapun pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini dikarenakan Kecamatan Lappariaja terdiri dari desa-desa kurang mandiri dikarenakan jumlah PAD tiap Desa tidak mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ada 2 yaitu :

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai Informan kunci adalah Camat Lappariaja.

2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/bukubuku/ catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen, meliputi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBDesa, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lainlain.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Lappariaja beserta aparatnya selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan ADD dan Pemerintah Desa di Kecamatan Lappariaja selaku Tim Pelaksana ADD yang terdiri dari 9 Desa, yakni Desa Mattampawalie, Ujung Lamuru, Sengeng Palie, Liliriatang, Wae Kecce'e, Pattuku Limpoe, Tonronge, Tenri Pakkua dan Patangkai.

2. Sampel

Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Lappariaja dilakukan secara acak dimana mengambil penelitian pada 5 Desa dari 9 jumlah Desa di Kecamatan Lappariaja, dimana kami memilih beberapa Desa yang memiliki kebutuhan ADD berbeda-beda serta memilih beberapa desa besar dan desa hasil pemekaran. Adapun sampel yang menjadi sampel

penelitian yakni Desa Mattampa walie, Liliriattang, Waekecce'e, Ujung lamuru, dan Sengeng Palie.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Lappariaja, Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Lappariaja, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara guna untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Lappariaja.
2. Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian terkumpul (data primer dan sekunder). Selanjutnya dianalisis secara secara kualitatif yaitu menguraikan isi serta mengkategorikan pemaknaan dari setiap kata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Bone dan Kecamatan Lappariaja.

1 Gambaran Umum Kabupaten Bone.

1.a Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Bone terletak dalam posisi kordinat $4^{\circ}13'-3^{\circ}06'$ LS dan antara $119^{\circ}42'-120^{\circ}30'$ BT, berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Barru dan Pangkep
- Sebelah Utara : Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh 174 Km dari Ibukota Provinsi Sul-Sel (Makassar) yang dapat dilalui dengan menggunakan angkutan darat.

Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 Km² atau 7,30% dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Bone terbagi dalam 27 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan 372 buah.

1.b Kondisi Demografis

Perkembangan penduduk Kabupaten Bone selama kurung waktu 2003-2007 memperlihatkan kecendrungan semakin meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 1,4% pertahun, yaitu dari 685.590 jiwa pada Tahun 2003 menjadi 699.910 jiwa pada Tahun 2007, serta tingkat kepadatan penduduk 2 jiwa per hektar. Penduduk Kabupaten Bone yang tergolong penduduk usia kerja (usia 10 tahun ke atas) tercatat sebanyak 560.526 orang pada tahun 2007, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2003 sebanyak 548.397 orang atau bertumbuh sebesar 2,16%. Berdasarkan hal tersebut Diperlukan perhatian dari pemerintah daerah dalam hal pengendalian jumlah dan kepadatan penduduk termasuk persebarannya berkaitan dengan fertilitas penduduk baik menyangkut tingkat kelahiran dan kematian penduduk atau tingkat urbanisasi.

2. Gambaran Umum Kecamatan Lappariaja

Lappariaja terdiri dari dua Suku Kata yaitu Lappa dan Riaja, Lappa artinya daratan yang rata sedangkan riaja berarti barat(sebelah barat) sehingga Lappariaja diartikan sebagai daratan yang terletak disebelah barat Kabupaten Bone. Kecamatan Lappariaja terbentuk berdasarkan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan.

2.a. Kondisi Geografis

Kecamatan Lappariaja merupakan salah satu Kecamatan diantara 27 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bone. Kecamatan Lappariaja memiliki luas wilayah 138.000 km² dengan koordinat geografis berada pada 4° 40° LS dan 119,59° BT. Kecamatan Lappariaja berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Lamuru
- Sebelah Barat : Kecamatan Tellulimpoe
- Sebelah Timur : Kecamatan Bengo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Libureng dan Kabupaten Maros

Kecamatan Lappariaja berjarak 55 km dari Ibukota Kabupaten Bone (Watampone). Dimana secara administratif Kecamatan Lappariaja terdiri dari 9 desa.

2.b Kondisi Demografis

Dengan mengetahui letak wilayah Kecamatan Lappariaja, maka akan lebih memperjelas dan memahami situasi masyarakat Kecamatan Lappariaja. Berdasarkan registrasi penduduk yang tercatat pada Tahun 2011, jumlah penduduk Kecamatan Lappariaja sebanyak 31.148 jiwa, dimana laki-laki sebanyak 15.439 dan perempuan sebanyak 15.709 jiwa

sedangkan pada tahun 2012 berdasarkan survey terakhir laporan rekapitulasi wajib pilih Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kecamatan Lappariaja sebanyak 32.969 jiwa sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2

Data penduduk Kecamatan Lappariaja

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK	DAK			DP4		
			L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Mattampa Walie	1.036	2.068	2.100	4.168	1.501	1.543	3.044
2	Lili riattang	909	2.060	1.975	4.035	1.431	1.458	2.889
3	Sengeng Palie	976	1.841	1.845	3.695	1.290	1.356	2.646
4	Tenri Pakkua	931	1.973	1.961	3.934	1.384	1.383	2.767
5	Patangkai	960	1.969	2.013	3.982	1.447	1.537	2.984
6	Ujung Lamuru	814	1.726	1.862	3.588	1.216	1.333	2.549
7	Pattuku Limpoe	831	1.918	1.917	3.835	1.351	1.388	2.739
8	Wae Kecce'e	663	1.258	1.329	2.587	910	967	1.877
9	Tonronge	709	1.575	1.570	3.145	1.100	1.149	2.249
Jumlah		7.829	16.388	16.581	32.969	11.630	12.114	23.744

Sumber : DP4 Wajib Pilih Kabupaten Bone

Dari Tabel 2 diketahui bahwa penduduk Kecamatan Lappariaja banyak kaum wanita, yaitu 16.581 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terbanyak berada pada desa Mattampa Walie.

B. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Biaya Operasional Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana peraturan Bupati Bone Nomor 4 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan ADD, meliputi :

- a. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung terdiri dari :
 - tunjangan Kepala Desa;
 - tunjangan Sekertaris Desa;
 - tunjangan Kepala Urusan;
 - tunjangan Kepala Dusun;

- tunjangan Ketua BPD;
 - tunjangan Wakil Ketua BPD;
 - tunjangan Sekertaris BPD;
 - tunjangan Anggota BPD;
- b. Belanja pegawai berupa honorarium pelaksana program dan kegiatan pemerintahan desa terdiri dari;
- honor panitia
 - honor pelaksana pengelola keuangan desa
 - honor imam desa
 - honor imam masjid
 - honor RT/RW
- c. Belanja barang dan jasa terdiri dari :
- perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD
 - belanja ATK
 - belanja pemeliharaan kendaraan dinas
 - belanja pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor
 - pendataan profil desa
 - pengadaan buku administrasi desa dan buku profil desa
- d. Belanja Modal terdiri dari :
- belanja modal tanah
 - belanja modal komputer
 - belanja modal peralatan/perlengkapan kantor

Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah biaya yang timbul dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan, diantaranya digunakan untuk:

- perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- kegiatan penanggulangan kemiskinan
- peningkatan kesehatan masyarakat
- pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran, dan prasarana kesehatan, pendidikan termasuk prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- teknologi tepat guna
- penyertaan modal usaha masyarakat melalui bumdes
- pengadaan ketahanan pangan.

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

- a. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
- b. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

- d. Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.
- e. Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100 % dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.
- f. Hasil kegiatan/proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelola Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD, terdiri dari:

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
- b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan di bentuk di Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan camat, jumlah pendamping tingkat kecamatan sebanyak 3 sampai 5 orang, dimana susunan tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari :

- a. Ketua : Camat
- b. Sekertaris : Sekertaris Kecamatan
- c. Anggota : Unsur perangkat Kecamatan dan unsur lain yang dianggap berkompeten.

Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah :

- a. memfasilitasi bimbingan teknik perencanaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
- c. memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan ADD kepada Pelaksana Tingkat Desa;
- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- f. memberikan laporan kemajuan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Ditingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa dengan penanggungjawab adalah Kepala Desa, dalam pelaksanaan kegiatan penanggungjawab (Kepala Desa) membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari :

- a. kegiatan rehabilitasi/pembangunan infrastruktur pedesaan dalam skala kecil;
- b. kegiatan belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa;
- c. kegiatan belanja operasional BPD.

Dalam hal pembelanjaan aparatur dan operasional Pemerintah Desa, Kepala Desa menetapkan salah satu perangkat Desa sebagai PTPKD. sedangkan dalam hal rehabilitasi/pembangunan infrastruktur pedesaan, kepala desa membentuk tim pelaksana kegiatan melalui musyawarah Desa. Dimana sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan ADD menetapkan tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari :

- a. Penanggung jawab : Kepala Desa
- b. Wakil Penanggung jawab : Sekertaris Desa
- c. Pelaksana Kegiatan : Ketua Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- d. Anggota : 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Desa berdasarkan hasil musyawarah.

Tim Pelaksana Tingkat Desa bertugas sebagai berikut :

- a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana biaya anggaran dan desain;
- b. menyusun Rencana Pembangunan Desa (RPD) untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

- c. melaksanakan kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari ADD;
- d. melakukan pengelolaan ADD;
- e. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan tentang perkembangan pengelolaan ADD;
- f. memberikan bimbingan, dorongan, dan pembinaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan kegiatan pembangunan secara partisipatif.;
- g. PTKPD / pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Kewajiban tim pelaksana kegiatan ini yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan dana serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan.

Dalam hal perencanaan kegiatan dan pengelolaan ADD maka Tim Pelaksana Tingkat Desa menyusun rencana kegiatan dan penggunaan ADD untuk disampaikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dimana pengadaan musrenbang dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPMMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun

2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan. Musrenbang sendiri menghasilkan :

- a. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan.
- b. daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Sesuai dengan hasil musrenbang, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Desa (APBDes) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Sebagaimana diketahui Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone setiap tahunnya, dimana penyaluran dana ADD tersebut melalui 3 tahapan yakni :

- a. tahap I sebesar 30% dari keseluruhan jumlah ADD (periode bulan Januari – Juni)
- b. tahap II sebesar 40% dari keseluruhan jumlah ADD (periode bulan Juli – November)
- c. tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan jumlah ADD (periode bulan Desember)

Untuk pencairan dana tersebut, sebagaimana dalam peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan ADD, pada

pasal 14 mengatur tata cara pengajuan pencairan dana ADD berdasarkan proses berikut :

- 1) Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati Bone Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bone melalui Camat.
- 2) Surat permohonan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) diteruskan oleh Camat selaku ketua Tim pendamping tingkat Kecamatan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bone setelah diadakan evaluasi, melalui surat pengantar dari Camat.
- 3) Kepala Bagian Pemerintahan Desa meneruskan permohonan pencairan dana ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diteliti dan dinyatakan layak secara administrasi.
- 4) Adapun kelengkapan surat permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Surat permohonan pencairan ADD tahap I dilampiri :

- a. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I
 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya.

2. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 3. Foto copy rekening Pemerintah Desa.
 4. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 5. Surat Kuasa dari Kepala Desa ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Surat Permohonan Pencairan ADD tahap II dan Tahap III dilampiri :
1. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II/III
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap sebelumnya berupa realisasi penerimaan dan belanja.
- c. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) huruf b butir 2 terdiri dari :
1. Belanja langsung :
 - Belanja Pegawai berupa honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Desa.
 - Belanja barang/jasa.
 - Belanja Modal.
 2. Belanja tidak langsung :

- Belanja pegawai/penghasilan tetap dan atau tambahan penghasilan tetap
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bantuan Keuangan
- Belanja tak terduga

d. Pencairan ADD tahap II/III hanya dapat dilakukan jika penggunaan dana tahap I/II telah sesuai dengan RPD tahap I/II dan penyerapan dana atas pelaksanaan kegiatan telah mencapai 90% atau sisa dana tahap I paling banyak 10%.

- 5) Camat dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan menandatangani permohonan setelah meneliti kelengkapan dan atau keabsahan Surat Permohonan Pencairan ADD beserta lampirannya dinyatakan lengkap dan atau sudah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuatkan surat pengantar ditunjukkan kepada Bupati Bone Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bone untuk diteliti lebih lanjut.
- 6) Surat Permohonan Pencairan ADD beserta lampirannya dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikembalikan ke desa untuk disempurnakan.

- 7) Tim fasilitasi tingkat kabupaten meneliti tingkat kelengkapan dan atau keabsahan Surat Permohonan pencairan ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dinyatakan lengkap dan atau sudah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuatkan surat rekomendasi persetujuan pencairan dana ADD kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bone.
- 8) Surat rekomendasi persetujuan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat 7 diterbitkan setelah Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten mengadakan evaluasi baik secara administrasi maupun secara fisik lapangan.
- 9) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat 8 ditandatangani oleh Asisten Bidang Tatapraja selaku Wakil Ketua Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.
- 10) Kepala Dinas Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bone selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menyalurkan Dana Alokasi Desa dari kas daerah ke rekening pemerintah daerah.
- 11) Pencairan dana dilakukan oleh bendahara ADD pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah
- 12) Tata cara pencairan ADD untuk setiap tahap berkaitan dengan adanya pemeriksaan dan atau keputusan pengadialan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kepala desa dan atau pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan ADD akan diputuskan

oleh tim-tim fasilitasi tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pedoman tersebut Kepala Desa selaku Pemerintah Desa berhak mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa maka dengan itu saya selaku peneliti menjadikan Kepala Desa selaku narasumber dalam hal penelitian ini, dikarenakan Kepala Desa dianggap mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD.

Dalam hal pambagian Alokasi Dana Desa(ADD) di Kabupaten Bone sebagaimana Peraturan Bupati Bone nomor 10 Tahun 2013, untuk tiap Desanya dibagi secara proporsional dengan berpedoman pada variable meliputi :

- a. Kemiskinan;
- b. Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Keterjangkauan;
- e. Jumlah Penduduk;
- f. Luas Wilayah;
- g. Target PBB;

Dengan rumusan tersebut untuk menghitung besarnya dana ADD untuk setiap Desa dengan rumus dasar sebagai berikut:

$$\Sigma ADDX = \Sigma(ADDM + ADDPX)$$

Keterangan :

ADDX : Alokasi Dana Desa

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 60%.

ADDPX : Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 40%.

Sebagaimana Aturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2013, formula penerimaan dana ADD kepada Desa berdasarkan:

- Rumus penerimaan Desa :

$$\text{ADDX} = \text{ADDM} + \text{ADDP} * \text{BDi}$$

- Rumus penetapan nilai bobot Desa (BDi) :

$$\text{BDi} = \sum \text{KVi} * \text{BVi}$$

Keterangan :

BDi : $(\text{KVKemiskinan} \times \text{BVKemiskinan}) + (\text{KVPendidikan} \times \text{BVPendidikan}) + (\text{KVKesehatan} \times \text{BVKesehatan}) + (\text{KVKeterjangkauan} \times \text{BVKeterjangkauan}) + (\text{KVJumlah Penduduk} \times \text{BVJumlah Penduduk}) + (\text{KVLuas Wilayah} \times \text{BVLuas Wilayah}) + (\text{KVTARGET PBB} \times \text{BVTARGET PBB})$.

BVi : Angka bobot dari masing-masing variabel.

KVi : Koefisien dari masing-masing variabel.

Setelah Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi tiap-tiap Desa dan mengkalkulasikan rumus diatas maka jumlah dana ADD yang diterima Desa di Kecamatan Lappariaja pada Tahun Anggaran 2012 berbeda dengan Tahun Anggaran 2013 dikarenakan bedanya sistem pembagian yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, berdasarkan petunjuk teknis pembagian ADD tahun 2012 membagi ADD sebesar Rp.59.500.000,00 per Desa sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3
ADD DESA
KECAMATAN LAPPARIAJA
Tahun Anggaran 2012

No.	DESA	Jumlah ADD Tahun 2012
1.	Desa Sengeng Palie	Rp.59.500.000,00
2.	Desa Wae Kecce'e	Rp.59.500.000,00
3.	Desa Liliriattang	Rp.59.500.000,00
4.	Desa Mattampa Walie	Rp.59.500.000,00
5.	Desa Tonronge	Rp.59.500.000,00
6.	Desa Patangkai	Rp.59.500.000,00
7.	Desa Ujung Lamuru	Rp.59.500.000,00
8.	Desa Tenri Pakkua	Rp.59.500.000,00
9.	Desa Pattuku Limpoe	Rp.59.500.000,00

Sumber : Petunjuk Teknis Pembagian ADD tahun 2012

Pada tahun anggaran 2013 sistem pembagian ADD secara minimal proporsional sebagaimana pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Alokasi Dana Desa
Kecamatan Lappariaja
Tahun 2013

NO	DESA	ADDM (RP)	ADDP(RP)	AADX(RP)
1	MATTAMPAWALIE	48.250.705,20	45.247.146,61	93.497.851,81
2	LILIRIATTANG	48.250.705,20	48.214.845,09	96.465.550,28
3	SENGENG PALIE	48.250.705,20	41.171.187,78	89.421.892,98
4	TENRI PAKKUA	48.250.705,20	31.786.010,03	80.036.715,23
5	PATANGKAI	48.250.705,20	39.586.265,33	87.836.970,52
6	TONRONGE	48.250.705,20	54.643.899,87	102.894.605,07
7	UJUNG LAMURU	48.250.705,20	37.079.645,74	85.330.350,93
8	PATTUKU LIMPOE	48.250.705,20	51.279.644,20	99.530.349,39
9	WAE KECCE E	48.250.705,20	31.863.963,34	80.144.668,53

Sumber : Lampiran Keputusan Bupati Bone No.177 Th.2013

C. Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung

dengan narasumber yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ADD di Kecamatan Lappariaja

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Lappariaja telah berjalan dengan baik meskipun masih ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dengan aturan hukum yang berlaku terkhusus Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, ADD bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Demi optimalnya kegiatan ADD, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan ADD di Kabupaten Bone untuk ditindak lanjuti dan dijadikan pedoman aparat terkait yang terlibat langsung dalam pengalokasian ADD di Kabupaten Bone terlebih di Kecamatan Lappariaja.

Dalam hal perencanaan pelaksanaan ADD di Kecamatan Lappariaja, berdasarkan wawancara dengan Sekertaris Kecamatan yang mewakili Camat Lappariaja selaku Tim Pendamping Kecamatan, menyatakan :

“ Alokasi Dana Desa direncanakan dan dilaksanakan oleh Desa, selanjutnya dibina oleh Camat selaku Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No.04 Tahun 2009. Untuk pelaksanaan ADD, seluruh desa telah mengeluarkan Perdes

tentang APBDes, dan saat ini telah mengajukan permohonan pencairan dana tahap 1.” (wawancara tanggal 24 Juli 2013)

Hal demikian diungkapkan pula oleh lima narasumber kami dari lima Desa di Kecamatan Lappariaja, Kepala Desa Ujung Lamuru mengungkapkan :

“ Begini De’, pertama-tama kami bersama BPD , Sekdes serta Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat telah mengadakan musyawarah untuk pembentukan APBDes.” (wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Kepala Desa Mattampa Walie, mengatakan :

“ Kemarin De’, telah diadakan musyawarah bersama semua elemen masyarakat, Ketua BPD, kepala Dusun dan jajaran perangkat Desa dalam hal membicarakan pembuatan APBDes dalam hal penyelenggaraan pengalokasian dana ADD”. (wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Kepala Desa Wae Kecce’e, mengatakan :

“ Di Desa Wae Kecce’e ini sudah diadakan musyawarah nak’ bersama dengan para tokoh masyarakat, perangkat desa, kadus serta telah terbit APBDes untuk Desa Wae Kecce’e ini” (wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Kepala Desa Sengeng Palie, mengatakan pula :

“ Untuk pelaksanaan ADD, di Desa Sengeng Palie ini nak’. kami telah mengadakan musyawarah bersama Ketua BPD dan jajarannya serta tokoh masyarakat dan aparat desa.” (wawancara tanggal 30 Juli 2013)

Sementara itu, Sekertaris Desa Liliriattang mengatakan :

“ Kami bersama Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun telah mengadakan musyawarah untuk pembuatan APBDes dalam pelaksanaan ADD” (wawancara tanggal 29 Juli 2013)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari berbagai narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa semua Desa di Kecamatan Lappariaja telah melaksanakan rancangan pengelolaan ADD di dalam APBDes selanjutnya di tetapkan menjadi Perdes sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009, APBDes yang disusun berdasarkan RKP Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Wawancara diatas menunjukkan pula bahwa pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa telah berjalan optimal, pemerintahan Desa telah menjalankan tugasnya dimana Kepala Desa telah mengkordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan Elemen Desa mengenai rencana penggunaan ADD dan menyusun rencana Peraturan Desa tentang APBDesa setelah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) sebagaimana tertuang dalam Pasal (5) tentang tugas Kepala Desa dan BPD.

Perencanaan pelaksanaan ADD di Kecamatan Lappariaja telah berjalan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan akan tetapi saat ini belum ada kegiatan ADD yang terlaksana, sebagaimana diungkapkan Kepala Desa Ujung Lamuru:

“ Sampai saat ini belum ada kegiatan yang berjalan karena belum adanya dana dari Pemerintah Daerah, tetapi telah ada rencana kerja dalam APBDesa” (wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Begitupula yang diungkapkan Kepala Desa Mattampa Walie, beliau mengatakan:

“ Saat ini, belum ada kegiatan ADD, sekarang masih dalam tahap permohonan, dimana pencairan dana tahap I ini kami memohon dana sebesar 60% dari total dana ADD untuk Desa Mattampa Walie.”(wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Ungkapan serupa juga dinyatakan dari 3 narasumber lainnya yakni belum adanya kegiatan ADD yang terlaksana di daerahnya yakni Desa Sengeng Palie, Waekecce'e dan Liliriattang.

ADD berperang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ADD merupakan sumber Pendapatan Desa terbesar dari sumber pendapatan desa lainnya, hal ini dipengaruhi karena kurangnya Pendapatan Asli Desa(PAD) untuk setiap Desa di Kecamatan Lappariaja ini sebagaimana yang saya muat dalam latar belakang penelitian saya. Tanpa adanya ADD Pemerintahan Desa mungkin sulit menjalankan tugasnya secara optimal, oleh karena itu ADD sangat berperang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lappariaja, hal ini diutarakan pula oleh beberapa Kepala Desa, Kepala Desa Mattampa Walie mengatakan:

“ ADD sangat membantu terutama dalam peningkatan kinerja”.
(wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Pentingnya peranan ADD juga diungkapkan Kepala Desa Wae Kecce'e, beliau mengatakan:

“ Dengan adanya ADD kegiatan Pemerintahan Desa dapat berjalan baik, ADD juga bereperan sebagai pendorong peningkatan PAD. Karena ADD jauh lebih banyak dari jumlah PAD di Desa Waekecce'e.” (wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Hal yang sama diutarakan pula Kepala Desa sengeng Palie, beliau mengatakan:

“ ADD sangat berperang penting dalam penyelenggaraan pemdes karena ADD merupakan sumber pemasukan terbesar dalam keuangan desa dan ADD sangat dinikmati masyarakat luas.” (wawancara tanggal 30 Juli 2013)

Berdasarkan pendapat dari narasumber diatas, saya dapat menyimpulkan bahwa ADD menempatkan diri pada urutan terdepan dalam mendukung pelaksanaan Pemerintahan Desa, oleh karena itu Pemerintah Desa diusahakan mampu mengelola ADD sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD dan menempatkan dana ADD sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Akan tetapi diharapkan Pemerintah Desa tidak bergantung sepenuhnya pada ADD karena ADD bukanlah satu-satunya sumber pendapatan Desa karena masih banyak pendapatan Desa lainnya sebagaimana dalam Undang-undang 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana Pendapatan Desa yakni:

- Pendapatan Asli Desa (PAD)

- Bagi Hasil Pajak
- Bagi hasil retribusi
- ADD
- Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan Desa lainnya
- Dana Hibah
- Sumbangan pihak ketiga

Oleh karena itu, ADD sebagai penyokong dana terbesar dari pendapatan Desa di Kecamatan Lappariaja diharapkan mampu menjadi pendorong peningkatan pendapatan desa lainnya terutamanya PAD, Pemerintah Desa diharapkan mampu mengelola ADD sebagai perangsang PAD agar nantinya Desa dapat lebih mandiri tanpa mengharapkan ADD sehingga dana ADD dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pembangunan Desa. Beberapa Kepala Desa mengatakan ADD mampu menjadi pendorong peningkatan PAD, sebagaimana yang diungkapkan Kepala Desa Ujung Lamuru, beliau mengatakan:

“ ADD sangat berperan dalam pembangunan desa dan dapat menjadi pendorong PAD.” (wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Hal yang sama diungkapkan pula Sekertaris Desa Liliriattang, mengatakan:

“ Dana ADD cukup berperan dalam perangsang peningkatan PAD, dimana jumlah PAD kami cukup minim dibandingkan jumlah ADD yang kami terima.” (wawancara tanggal; 29 Juli 2013)

Pendapat narasumber diatas, dinilai dapat bernilai positif dimana beberapa desa di Kecamatan Lappariaja dapat menjadikan ADD sebagai pendorong peningkatan pendapatan asli Desa, Hal ini menunjukkan pula bahwa tujuan ADD sebagaimana aturan Bupati Bone Nomor 04 Tahun 2009 pasal 3 huruf (c) mengatakan bahwa tujuan ADD adalah meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dapat terlaksanakan dengan baik di Desa-desa di Kecamatan Lappariaja.

Dalam hal pelaksanaan ADD sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa menentukan bahwa 30% dana ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintahan Desa dan 70% dana ADD digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu beberapa desa telah membuat APBDes yang memuat peruntukan dana ADD, dalam hal pelaksanaan aturan tersebut Kepala Desa Ujung Lamuru mengatakan:

“Saat ini telah ada pembagiannya dalam APBDes de’, untuk kegiatan fisik berupa pembuatan pagar kantor Desa dan jalan tani serta sisa 30% nya digunakan untuk gaji perangkat Desa dan pengadaan ATK dan lainnya.” (wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Kepala Desa Wae Kecer’e mengatakan:

“ Sudah diperuntukkan 30% untuk operasional Desa dan sisa 70% dari keseluruhan dana ADD ditunjukkan untuk pembuatan pagar desa dan perbaikan jalan di beberapa dusun.” (wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Kepala Desa Mattampa Walie mengatakan:

“ Sebagaimana APBDes yang telah disepakati bersama, pembagian 30% ADD diperuntukkan untuk pembinaan PKK,

pembinaan sumber daya aparat sedangkan untuk 70% telah diperuntukkan untuk pengecoran jalan Desa, pembenahan lapangan bola dan penampungan air bersih.” (wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Sementara itu Sekertaris Desa Liliriattang mengatakan:

“ Berdasarkan APBDes Tahun 2013, kami telah membagi dana ADD, dimana 30% untuk keperluan pemerintah desa dan 70% berupa perbaikan jalan dan pembuatan tugu desa.” (wawancara tanggal 29 Juli 2013)

Kepala Desa Sengeng Palie mengatakan:

“ Sebagaimana APBDes yang telah kami sepakati bersama telah ada pembagian dimana dana ADD sebesar 30% untuk gaji aparat desa dan 70% untuk kegiatan fisik yakni berupa perintisan dan perbaikan jalan Desa.” (wawancara tanggal 30 Juli 2013)

Sebagaimana pendapat Kepala Desa Sengeng Palie jika dikaitkan dengan APBdes sebagaimana yang telah diundangkan dalam Peraturan Desa, maka secara umum pembagian dana ADD berdasarkan Perdes Nomor 1 Tahun 2013 Desa Sengeng Palie tentang APBDes sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sengeng Palie Tahun 2013 terdiri atas:

1. Pendapatan Desa terdiri dari:

1.1 Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.000.000,00
1.2 Bagi Hasil Pajak	Rp. 5.312.500,00
1.3 Bagi Hasil Retribusi	Rp. –
1.4 ADD	Rp. 89.421.892,98
1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp. 54.900.000.00
1.6 Hibah	Rp. –

1.7 Sumbangan pihak ketiga	Rp. –
Jumlah Pendapatan	Rp. 154..634392.98

2. Belanja Desa terdiri dari:

2.1 Belanja Langsung, terdiri	
2.1.1 Belanja Pegawai/honorium	Rp.17.522.500.00
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.416.657.89
2.1.3 Belanja Modal	Rp. 7.500.000.00
2.2 Belanja Tidak langsung, terdiri:	
2.2.1 Belanja Pegawai/penghasilan tetap	Rp. 3.700.000.00
2.2.2 Balanja Tambahan Penghasilan	Rp. 3.700.000.00
2.2.3 Belanja Hibah	Rp. –
2.2.4 Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.000.000.00
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan	Rp.114.495.325.09
2.2.6 Belanja Tak terduga	Rp.-
Jumlah Belanja	Rp. 154.634.392.98

Berdasarkan uraian belanja Desa Sengeng Palie berdasarkan APBDes Tahun 2013 dari dana ADD:

a. Pembagian 30% dari ADD , berupa:

- Belanja Pegawai dan Honorarium Tim Pembuatan Laporan Evaluasi
Rp. 600.000
- Honor pelaksana program kegiatan Pemerintahan Desa
Rp.11.610.000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Rp.1.400.000.00

- Belanja ATK Rp. 816.000.00
- Belanja prangko, materai, dan benda pos lainnya Rp. 500.000.00
- Belanja cetak dan penggandaan Rp. 700.000.00
- Belanja Modal peralatan kantor Rp.1.500.000.00
- Belanja modal pengadaan Komputer Rp. 6.000.000.00
- Tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD Rp. 3.700.000.00

Jumlah belanja Rp. 26.826.000.00

$$\begin{aligned}\text{Jumlah dana ADD sebesar 30\% dari total ADD} &= 89.421.892,98 \times 30\% \\ &= 26.826.568,98\end{aligned}$$

jadi penggunaan dana ADD untuk kuota 30% sesuai dengan jumlah dana.

b. Pembagian 70% dari ADD , berupa:

- Bantuan kepada panitia hari raya Rp. 1.500.000.00
- Bantuan generasi muda Rp. 1.500.000.00
- Perintisan dan pengerasan jalan tani Rp. 20.000.000.00
- Perbaikan jalan tani dan jalan dusun Rp. 19.500.000.00
- Perbaikan jembatan gantung Rp.10.000.000.00
- Pengadaan pompa air untuk kelompok tani Rp. 4.000.000.00
- Pemeliharaan kantor desa Rp. 1.595.000.00
- Bantuan pembinaan PKK Rp. 1.500.000.00
- Penyusunan Sistem Data Base Desa (SDD) Rp. 3.000.000.00

Jumlah belanja Rp. 62.595.000.00

$$\begin{aligned}\text{Jumlah dana ADD sebesar 70\% dari total ADD} &= 89.421.892,98 \times 70\% \\ &= 62.595.324,98\end{aligned}$$

Jadi penggunaan untuk kuota 70% sesuai dengan jumlah Dana.

Berdasarkan paparan narasumber diatas menunjukkan jawaban yang relatif sama dimana telah mengadakan peruntukan dana ADD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 angka (2) Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang ADD. jadi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan Desa di Kecamatan Lappariaja telah menempatkan fungsi dan pembagian dana ADD sesuai pada tempatnya berdasarkan aturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan keseluruhan narasumber, saya dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa penerapannya dapat terlaksanakan di Kecamatan Lappariaja dilihat dari proses pembinaan, perencanaan, perantaraan dan pembagian ADD yang dilakukan instansi terkait dalam pelaksanaan ADD di Kecamatan Lappariaja yakni Pemerintah Kecamatan selaku Tim Pendamping Kecamatan dan pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Tingkat Desa.

2. Hambatan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik sebagaimana aturan perundang-undangan. Namun demikian pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Lappariaja masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para narasumber.

Kepala Desa Wae Kecce'e mengungkapkan permasalahan yang mereka dapatkan dalam proses pelaksanaan ADD di Desanya, sebagaimana dalam pelaksanaanya beliau mengatakan:

“ Hambatan utamanya karena belum adanya dana ADD yang keluar dan kami telah mengadakan permohonan dan telah di privikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.” (wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa sengeng Palie, beliau mengatakan:

“Hambatannya yakni pencairan dananya terlambat nak'.Dana Tahap I belum cair sementara waktunya sudah memasuki pencairan tahap II.” (wawancara tanggal 30 Juli 2013)

Sementara itu, Kepala Desa Ujung Lamuru mengatakan:

“ Saat ini De',belum adanya pencairan dana ADD jadi belum ada kegiatan yang terlaksana dan belum adanya petunjuk teknis dari kabupaten sehingga tim dari kecamatan belum mengadakan privikasi.” (wawancara tanggal 27 Juli 2013).

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Desa Mattampa Walie, beliau mengatakan:

“ Hambatannya karenabelum adanya pencairan damna ADD untuk tahap I serta belum adanya petunjuk teknis ADD.” (wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Hal yang diungkapkan oleh Kepala Desa Ujung Lamuru dan Mattampawalie sangat berbeda dengan penyampaian Sekertaris Kecamatan (Sekcam) Lappariaja, beliau mengatakan:

“ Saat ini baru empat desa yang telah di privikasi yakni Desa Wae Kecce’e, Tenri Pakkua, Sengeng Palie dan Patangkai.”
(wawancara tanggal 24 Juli 2013)

Dari pendapat Sekcam diatas menegaskan bahwa keterlambatan pencairan dana di dua desa itu semata-mata karena Desa tersebut belum mengajukan permohonan pencairan dana ADD dan belum lulus privikasi karena kedua Desa tersebut belum dinyatakan lulus privikasi. Hal ini berkesesuaian dengan permasalahan pada Desa Liliriattang, Sekertaris Desa Liliriattang mengatakan:

“ Kami sudah melaksanakan permohonan pencairan dana, akan tetapi ditolak dan sementara perbaikan sehingga belum adanya privikasi dari Tim pendamping Kecamatan oleh karena belum adanya dan jadi kegiatan belum terlaksana.” (wawancara tanggal 29 Juli 2013)

Oleh karena belum diterimanya dana ADD jadi belum ada kegiatan yang telah direncanakan terlaksana sesuai dengan waktu dan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2008 mengenai pembagian dana ADD dalam tiga tahapan yaitu:

- a. Tahap I sebesar 30% dari keseluruhan jumlah ADD dimana priodenya Januari hingga Juni.

- b. Tahap II sebesar 40% dari keseluruhan jumlah ADD dimana priodenya Juli hingga November.
- c. Tahap III sebesar 30% dari keseluruhan jumlah ADD dimana priodenya Desember.

Berdasar aturan tersebut, maka saat ini telah memasuki tahap II akan tetapi belum adanya dana dan kegiatan yang terlaksana, Sebagaimana yang diungkapkan Sekcam Lappariaja:

“Hambatannya karena belum adanya pencairan dana ADD tahap I dan waktunya telah memasuki tahap II. Hal ini menimbulkan tidak terlaksananya kegiatan ADD di Desa-desa di Kecamatan Lappariaja.” (wawancara tanggal 24 Juli 2013)

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kendala utama pelaksanaan ADD yaitu penyaluran ADD tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan keterlambatan Desa dalam melakukan permohonan pencairan dana ADD dan terlambatnya petunjuk teknis penyusunan APBDes dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Permasalahan lain yang menurut saya muncul dalam pelaksanaan ADD selama berlakunya Perda No. 11 Tahun 2008 tentang ADD yakni pembagian ADD untuk setiap Desanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada tahun Anggaran 2008 sampai tahun Anggaran 2012 menganut sistem minimal yang berarti peruntukan Dana ADD untuk setiap Desanya mempunyai jumlah yang sama. Peraturan Bupati tersebut tidak berkesesuaian dengan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang ADD. hal tersebut menimbulkan masalah untuk setiap Desa, karena jumlah

kebutuhan Desa berbeda-beda dalam rangka penyelenggaraan pemdes, sebagaimana diungkapkan oleh Sekertaris Desa Liliriattang:

“ Pada tahun anggaran kemarin, kami cukup terbatas dalam hal pelaksanaan ADD dikarenakan jumlah dana ADD tidak sesuai dengan kebutuhan Desa. Akan tetapi saat ini, kami berharap dana ADD dapat tercukupi sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dan kami berharap pula agar Bapak Bupati Bone dapat merealisasikan janjinya yakni pembagian dana ADD untuk setiap Desa sebesar seratus juta rupiah.” (wawancara tanggal 29 Juli 2013)

Dari pendapat Sekdes Lililriatang tersebut ditarik kesimpulan bahwa sistem pembagian ADD secara minimal menimbulkan keterbatasan dalam hal penyelenggaraan pemdes dimana dana yang diterima dianggap tidak mencukupi sehingga kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat pada saat pembuatan APBDes tidak dapat terlaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut juga diperjelas dari pendapat beberapa Kepala Desa, Kepala Desa WaeKecce'e mengatakan:

“Pada tahun anggaran kemarin, kami merasa terbatas dengan adanya pembagian secara sistem minimal dikarenakan jumlah dana yang kami terima tidak cukup dan kami berharap agar sistem pembagian proporsional dapat bertahan di masa pemerintahan sekarang ini. Karena kami cukup terbatas jika jumlah dana tidak sesuai dengan kebutuhan Desa kami.” (wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Pendapat Kepala Desa Wae Kecce'e tersebut membuktikan bahwa langkah yang diambil pemerintah Daerah memang tidak sepenuhnya melihat secara langsung permasalahan serta kendala dalam pelaksanaan sitem minimal, Pemerintah Daerah sendiri tidak merujuk pada perturan

Daerah nomor 11 Tahun 2008 tentang ADD meski didalam Perda itu sendiri mengatur rumusan besarnya ditetapkan pada Peraturan Bupati akan tetapi telah dipertegas bahwa pembagiannya secara proporsional.

Meski pada saat peralihan wewenang Bupati Bone ke priode selanjutnya, telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur pembagian secara proporsional akan tetapi Pemerintah Desa belum cukup paham dengan sistem tersebut dikarenakan Desa-desa di kecamatan Lappariaja telah terbiasa dengan petunjuk teknis tahun anggaran kemarin, namun mereka bersyukur karena sistem proporsional sekarang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Desanya, begitupula yang diungkapkan oleh Kepala Desa Mattamawalie:

“Saat ini sistemnya sudah proporsional, dengan sistem baru ini kami masih dalam tahap penyesuaian. Kami lebih memilih sistem proporsional karena menurut saya, sistem ini cukup adil karena sesuai dengan kebutuhan Desa dibandingkan sistem yang berlaku kemarin (2008-2012) dimana dengan sistem pembagian rata menimbulkan ketidakadilan karena Desa yang dekat dengan perkotaan (watampone) mempunyai ADD yang sama dengan desa dipelosok dimana ekonomi desa berbeda-beda.”
(wawancara tanggal 28 Juli 2013)

Kepala Desa Ujung Lamuru juga memperjelas bahwa sistem proporsional lebih baik dari sistem yang di berlakukan Pemda sebelumnya, beliau mengatakan:

“ Kami selaku Pemerintah Desa, merasakan bahwa sistem pembagian secara proporsional lebih baik dikarenakan pembagiannya berdasarkan kebutuhan Desa sehingga dapat berperang aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”
(wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Kita perlu ketahui bahwa Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hirarki susunan pemerintahan di negara Indonesia juga mengemban amanat otonomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan semenjak Tahun 1999. Dalam upaya peningkatan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintahan desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan.

Desa mempunyai hak untuk memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan melalui kas desa. Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, maka desa memerlukan perhatian secara proporsional dengan memposisikan lembaga desa dalam satu koridor hukum yang dapat menjamin eksistensi desa dengan mempertimbangkan asas keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat.

Hal ini merupakan tuntutan kondisi obyektif, karena dari sisi ketatanegaraan, lembaga desa merupakan institusi terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipandang relatif lebih dekat dengan karakter sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bone kedepannya tidak memberlakukan lagi sistem pembagian secara minimal dan memperhatikan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 agar supaya tingkat pembangunan Desa semakin berkembang dan ADD dapat tepat sasaran sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan rancangan ADD dalam Peraturan Desa tentang APBDes tiap Desa, aparat Pemerintahan Desa juga telah melakukan musyawarah dalam hal perencanaan ADD. Sebagaimana Perda tentang ADD yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD dapat menjadi arahan bagi Tim Pelaksana Desa dalam menjalankan ADD baik dalam hal pengalokasian dana serta tujuan penggunaan dana.
2. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan ADD yang ditemui yakni penyaluran ADD tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan keterlambatan Desa dalam melakukan permohonan pencairan dana ADD dan terlambatnya petunjuk teknis penyusunan APBDes dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Dana Alokasi Desa terkadang melewati batas tahap penganggaran, dimana dana

ADD tahap I belum diterima di pertengahan tahun anggaran dan anggaran tahap III terkadang diterima di awal tahun depan anggaran berikutnya. Kedala yang juga ditemui yakni Desa di Kecamatan Lappariaja masi dalam tahap penyesuaian dalam hal penggunaan dana ADD dikarenakan sistem pembagian ADD tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana tahun anggaran 2013 memakai sistem proporsional minimal dan sistem yang digunakan tahun sebelumnya yakni sistem minimal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang ADD di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone masa datang. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pencairan dana ADD pemerintah Desa diharapkan mampu menyusun rancangan penggunaan ADD sebagaimana tujuannya sehingga mempermudah privikasi dari Tim Pendamping Kecamatan.
3. Pemerintah Daerah dapat membagikan dana ADD tepat waktu agar kegiatan dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Harapan penulis dan semua pihak, Pelaksanaan Perda no 11 Tahun 2008 tentang ADD dapat terlaksanakan dan menjadi pedoman Pemerintahan Desa di Kabupaten Bone terkhusus di Kecamatan Lapariaja serta kebijakan ADD akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya desa akan berdampak pada majunya dan kuatnya negara.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perihal Undang-undang, Rajawali Pers : Jakarta

Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa,
Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Hamidi, Jazim. 2011. Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah,
Prestasi Pustaka : Jakarta

Huda, Ni'matul. 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah. FH UII Press
: Yogyakarta

Jeddawi, Murtir. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah, UII Pers :
Yogyakarta

_____. 2011. Manifestasi Otonomi Daerah, Total Media :
Yogyakarta

Muluk, Khairul. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah,
Bayumedia Publishing : Malang

Ridwan. 2009. Hukum Administrasi di Daerah, FH UII Press : Yogyakarta

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan publik Teori dan proses*, Buku Kita :
Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan :

- ✓ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- ✓ Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- ✓ Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- ✓ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN SEKERTARIS CAMAT LAPPARIAJA

Bertempat di Kantor Kecamatan Lappariaja



WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA UJUNG LAMURU

Bertempat di Rumah Kepala Desa Ujung Lamuru



WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA WAEKECCE'E

Bertempat di Rumah Kepala Desa Waekecce'e



WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA MATTAMPA WALIE

Bertempat di Rumah Kepala Desa Mattampa walie



WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA SENGENG PALIE

Bertempat di Rumah Kepala Desa S.Palie



WAWANCARA DENGAN SEKERTARIS DESA LILIRIATTANG

Bertempat di Kantor Desa Liliriattang

